

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama* , Salemba empat, Jakarta.
- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah.*, Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat
- Abdul, Halim. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Anandita, Dita Tri. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Arikunto, S., 2010. *Prosedur Penelitian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung, Lingga Jaya.
- Azhar Susanto.2004.*Sistem Informasi Manajemen konsep dan pengembangannya*. Lingga Jaya.Bandung.
- Azhar, La Midjan dan Susanto, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi I dan II.*, Edisi Ke Sebelas, Lembaga Informatika, Bandung.

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008., *Kode Etik dan Standar Audit, Diklat Pembentukan Auditor Ahli Kode MA : 2.210, Edisi Kelima*, PPPP-BPKP, Bogor
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jogiyanto, Hartono, 2006. *Analisis & Desain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta.
- KEPMENDAGARI No. 29/2002 yang selanjutnya diganti dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006.
- Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat (1) tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Kepres No.17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD.)
- LAN, BPKP. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta, Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi
- Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 355/KMK07/2001 dalam pembuatan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Pasal 232 tentang pendefinisian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan penerapannya.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi. Edisi ke-3*, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 Pasal 232 tentang pendefinisian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2001 tentang penerapan sistem akuntansi keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2001 tentang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) tentang serangkaian prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi.

- Ravrisond Baswir, 1998, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta, BPFE.
- Sastradipraja, Usman. 2010. *Buku Ajar Analisis dan Penggunaan Laporan Keuangan*, Bandung, Universitas Widyatama.
- Sekda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Maman S Sunjaya (2016). *Aset Pemkab Kabupaten Bandung Barat Kerap Bermasalah*, [www.jabar.pojoksatu.id / http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/02/23/aset-pemkab-kabupaten-bandung-barat-kerap-bermasalah/](http://www.jabar.pojoksatu.id/http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/02/23/aset-pemkab-kabupaten-bandung-barat-kerap-bermasalah/). Diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 16.30 WIB.
- Stanbury, P. F, 2003. *Principle of Fermentation Technology*, Pergamos Press. Ltd, Oxford.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*, Transito, Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta, Bandung.
- Uma Sekaran, 2006. *Research Methods For Business, Edisi 4*, Buku 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.